BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana kerja SKPD yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang dirumuskan dalam RPJMD, RKPD, Renstra SKPD dan Renja SKPD disusun berdasarkan pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu, kerangka pendanaan dan pagu indikatif, dan urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggung jawab SKPD.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Biro Umum mempunyai arti penting dalam mendukung penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2017.
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dimana Renja tahun 2017 ini disusun

pada masa transisi pergantian kepemimpinan daerah dan antara RPJMD 2010-2015 dengan RPJMD2016-2020, dimana masih mempedomani RPJMD 2010-2015 yang lama.

Berdasarkan analisis terhadap faktor internal dan eksternal yang ada, serta mempertimbangkan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang sesuai dengan tugas dan fungsi, Biro Umum ingin mewujudkan visi:

"Menjadi Biro yang Handal di Bidang Pelayanan Pimpinan dan Kesekretariatan"

Untuk mewujudkan visi di atas, Biro Umum mengupayakan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana yang memenuhi standarisasi.
2. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berorientasi pelayanan prima.

Penyusunan Renja SKPD Tahun 2017 ini masih mempedomani Renstra SKPD 2010-2015 yang lama karena disusun pada masa peralihan kepemimpinan daerah. Pada masa peralihan ini hingga KDH/WKDH yang baru merumuskan RPJMD baru periode 2016-2020, untuk menghindari kekosongan maka RPJMD lama/sebelumnya menjadi pedoman sementara.

1.2. Landasan Hukum

Renja Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 ini disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundangan berikut:

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang

Pembentukan Daerah Swatantra Tk.I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahanantara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Berita Negara Tahun 2011 Nomor 210);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program / kegiatan tahun 2017, dan perencanaan program / kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Biro Umum Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2017.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Biro Umum Tahun 2017 ini adalah sebagai bahan penyusunan RKPD Tahun 2017 yang selanjutnya menjadi pedoman penyusunan RAPBD 2017.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2015
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2015 dan Capaian Renstra SKPD
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
3.2 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2015

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2015 dan Capaian Renstra SKPD

Berdasarkan Rencana Kerja tahun 2015, Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai 9 (sembilan) program dan 46 (empat puluh enam) kegiatan sebagai berikut :

I. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah:

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
5. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
7. Penyediaan Alat Tulis Kantor
8. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
11. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
12. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
13. Penyediaan Makanan dan Minuman
14. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah
15. Penyediaan Jasa Sopir Kantor

II. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah:

1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
2. Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas/Mess
3. Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas/Mess
4. Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi
5. Pengadaan Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi
6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi
7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Dinas/Mess
8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
9. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
10. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
11. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas/Mess
12. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
13. Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi
14. Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan
15. Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD
16. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

III. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah:

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
2. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
3. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

IV. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah:

1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

V. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah:

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
3. Penatausahaan Keuangan SKPD

VI. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah:

1. Penyediaan Jasa Pelayanan Tamu Pemerintah Daerah
2. Peringatan Hari-Hari Besar Nasional

VII. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah:

- Intensifikasi Penerimaan Retribusi Pengelolaan Istana Bung Hatta

VIII. PROGRAM PENGEMBANGAN MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah:

- Peningkatan Pelayanan Keprotokolan

IX. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah:

1. Forum Komunikasi Persandian
2. Bimbingan Teknis Aparatur Penatausahaan Pimpinan
3. Bimbingan Teknis Keprotokolan
4. Bimbingan Teknis Peningkatan Etos Kerja Biro Umum

Alokasi anggaran pelaksanaan program dan kegiatan tersebut bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2015, dengan total pagu sebesar Rp.35.462.542.649,00 untuk anggaran murni dan sebesar Rp. 30.861.242.649,00 untuk anggaran perubahan, dengan realisasi sebesar Rp 28.350.701.448,00 dengan persentase mencapai 91,87%. Rincian realisasi anggaran belanja langsung Biro Umum Tahun Anggaran 2015 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1
Realisasi Anggaran Belanja Langsung TA. 2015

PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**12.162.939.403**	**10.515.424.510**	**86,45**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	246.079.000	216.091.343	87,81
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	2.420.712.400	2.302.180.283	95,10
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	434.994.457	317.588.500	73,10
Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	5.712.000	-	-
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	227.273.200	203.276.354	89,44
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	972.400.000	960.497.100	98,78
Penyediaan Alat Tulis Kantor	322.217.094	312.663.268	97,03
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	272.700.650	263.881.370	96,77

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	74.500.000	61.189.000	82,13
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.007.941.000	905.380.000	89,82
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	39.000.000	34.445.700	88,32
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	79.898.800	79.881.900	99,98
Penyediaan Makanan dan Minuman	95.625.000	93.450.000	97,73
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan ke Luar Daerah	5.406.495.802	4.470.899.692	82,69
Penyediaan Jasa Sopir Kantor	318.500.000	294.000.000	92,31
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**10.051.560.578**	**9.356.226.833**	**93,08**
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	5.409.777.307	5.124.583.700	94,73
Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan / Dinas / Mess	622.235.500	569.978.000	91,60
Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan / Dinas / Mess	345.011.143	316.141.000	91,63
Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	58.750.000	56.000.000	95,32
Pengadaan Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi	612.550.000	558.370.000	91,16
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi	23.700.000	9.020.000	38,06
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Mess	210.000.000	197.105.200	93,86
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	482.794.500	412.703.000	96,25
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	197.995.560	171.334.427	86,53
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	576.290.375	563.268.456	97,74
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Rumah Jabatan / Dinas / Mess	210.859.000	183.557.500	87,05
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	99.150.000	88.792.500	89,55
Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi	58.000.000	13.714.000	23,64
Pemeliharaan Rutin / Berkala Instalasi dan Jaringan	77.737.500	26.562.500	34,17
Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD	59.839.000	57.948.550	96,84
Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	1.060.870.693	1.007.148.000	94,94

Program Peningkatan Disiplin Aparatur	**578.577.600**	**533.584.000**	**92,22**
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	397.627.600	396.409.000	99,69
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	29.700.000	29.425.000	99,07
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	151.250.000	107.750.000	71,24
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**93.526.000**	**72.273.800**	**77,28**
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	93.526.000	72.273.800	77,28
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	**372.235.513**	**360.442.590**	**96,83**
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	78.536.900	69.069.800	87,95
Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	82.334.613	80.032.250	97,20
Penatausahaan Keuangan SKPD	211.364.000	211.340.540	99,99
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan	**6.898.071.805**	**6.678.650.875**	**96,82**
Penyediaan Jasa Pelayanan Tamu Pemerintah Daerah	6.259.211.955	6.120.942.325	97,79
Peringatan Hari-hari Besar Nasional	638.859.850	557.708.550	87,30
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	**116.040.600**	**98.614.500**	**84,98**
Intensifikasi Penerimaan Retribusi Pengelolaan Istana Bung Hatta	116.040.600	98.614.500	84,98
Program Pengembangan Manajemen Pelayanan Publik	**587.362.200**	**514.713.490**	**87,63**
Peningkatan Pelayanan Keprotokolan	587.362.200	514.713.490	87,63
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	**239.818.950**	**220.770.850**	**92,06**
Forum Komunikasi Persandian	62.769.300	54.747.800	87,22
Bintek Aparatur Penatausahaan Pimpinan	61.088.250	58.027.550	94,99
Bimbingan Teknis Keprotokolan	51.160.400	44.794.900	87,56
Bintek Peningkatan Etos Kerja Biro Umum	64.801.000	63.200.600	97,53
JUMLAH TOTAL	**30.861.242.649**	**28.350.701.448**	**91,87**

- **Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.**

  Pada pelaksanaan program/kegiatan Tahun Anggaran 2015, terdapat **1 (satu) kegiatan** yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran sesuai dengan yang direncanakan, yaitu kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS.

  - Pada tahun 2015 ditetapkan target sebesar 100% untuk memenuhi kebutuhan pemeliharaan kesehatan KDh dan WKDh dan pembelian obat-obatan melalui kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS. Dari jumlah dana APBD murni sebesar Rp. 260.000.000,- dan setelah perubahan menjadi Rp. 5.712.000,- terealisasi Rp. 0,- (0%). Kegiatan ini tidak dapat terlaksana karena diberlakukannya Undang-Undang tentang BPJS, sehingga untuk kebutuhan jaminan kesehatan telah tercakup dalam kepesertaan BPJS Kesehatan.

- **Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.**

  45 (empat puluh lima) kegiatan lainnya telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran sesuai yang direncanakan. Dari 45 kegiatan tersebut, terdapat **28 (dua puluh delapan) kegiatan** yang penyerapan anggarannya 95% atau lebih kecil. Namun demikian, tidak mempengaruhi pencapaian target hasil/keluaran berdasarkan indikator yang telah ditetapkan untuk masing-masing kegiatan, karena secara fisik kegiatan tersebut terlaksana 100%. 28 (dua puluh delapan) kegiatan dimaksud berikut penjelasannya dapat diuraikan sebagai berikut:

  1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat, jumlah dana Rp. 246.079.000,- realisasi sebesar 216.091.343,- (87,81%). Serapan anggaran tidak

mencapai target disebabkan adanya 1 (orang) Tenaga PTT yang pensiun sehingga menyebabkan silpa pada honorarium non PNS.

2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, jumlah dana Rp.434.994.457,- realisasi sebesar Rp.317.588.500,- (73,01%). Serapan anggaran tidak mencapai target disebabkan karena situasional tidak banyaknya kebutuhan acara yang memerlukan penyewaan peralatan dan perlengkapan. Secara fisik realisasi menunjukan 100% karena kebutuhan jasa penyewaan peralatan dan perlengkapan kantor dapat terpenuhi.
3) Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah, jumlah dana Rp. 227.273.200,- realisasi sebesar Rp.203.276.354,- (89,44%). Serapan anggaran tidak mencapai target disebabkan oleh berkurangnya jumlah premi asuransi yang harus dibayarkan.
4) Penyediaan Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Setda, jumlah dana Rp. 74.500.000,- realisasi sebesar Rp.61.189.000,- (82,13%). Serapan anggaran tidak mencapai target disebabkan karena situasional tidak banyaknya kebutuhan Penyediaan Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Setda. Secara fisik realisasi menunjukan 100% karena kebutuhan Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Setda dapat terpenuhi.
5) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, jumlah dana Rp. 1.007.941.000,- realisasi sebesar Rp.905.380.000,- (89,82%). Serapan anggaran tidak mencapai target disebabkan karena efisiensi pengadaan barang/jasa. Secara fisik realisasi menunjukan 100% karena kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dapat terlaksana semua.
6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, jumlah dana Rp. 39.000.000,- realisasi sebesar Rp.34.445.700,- (88,32%). Serapan anggaran tidak mencapai target disebabkan

karena menyesuaikan kebutuhan judul buku bacaan dan peraturan perundang-undangan kebutuhan pimpinan.

7) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Luar Daerah, jumlah dana Rp.5.406.495.802,- realisasi sebesar Rp.4.470.899.692,- (82.69%). Serapan anggaran tidak mencapai target disebabkan efisiensi pelaksanaan anggaran dan menyesuaikan frekuensi banyaknya rapat-rapat koordinasi yang diikuti.
8) Penyediaan Jasa Sopir Kantor, jumlah dana Rp.318.500.000,- realisasi sebesar Rp.294.000.000,- (92,31%). Serapan anggaran tidak mencapai target disebabkan beberapa personil yang mengundurkan diri, sehingga adanya sisa lebih belanja jasa sopir kantor.
9) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, jumlah dana Rp.5.409.777.307,- realisasi sebesar Rp.5.124.583.700,- (94,73%). Serapan anggaran tidak mencapai target disebabkan pengadaan kendaraan dinas/operasional tergantung pada harga jual khusus plat merah yang dikeluarkan ATPM pada saat pengadaan. Secara fisik realisasi menunjukan 100% karena kebutuhan Kendaraan Dinas/Operasional dapat terpenuhi.
10) Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas/Mess, jumlah dana Rp.622.235.500,- realisasi sebesar Rp.569.978.000,- (91,60%). Serapan anggaran tidak mencapai target disebabkan efisiensi pengadaan barang/jasa kebutuhan Peralatan Rumas Jabatan/Dinas/Mess. Secara fisik realisasi menunjukan 100% karena kebutuhan Peralatan Rumas Jabatan/Dinas/Mess dapat terpenuhi.
11) Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas/Mess, jumlah dana Rp.345.011.143,- realisasi sebesar Rp.316.141.000,- (91,63%). Serapan anggaran tidak mencapai target disebabkan efisiensi pengadaan barang/jasa kebutuhan Perlengkapan Rumas

Jabatan/Dinas/Mess. Secara fisik realisasi menunjukan 100% karena kebutuhan Perlengkapan Rumas Jabatan/Dinas/Mess dapat terpenuhi.

12) Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi, jumlah dana Rp.58.750.000,- realisasi sebesar Rp.56.000.000,- (91,63%). Serapan anggaran tidak mencapai target disebabkan efisiensi pengadaan barang/jasa kebutuhan Komputer dan Jaringan Komputerisasi. Secara fisik realisasi menunjukan 100% karena kebutuhan Komputer dan Jaringan Komputerisasi dapat terpenuhi.
13) Pengadaan Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi, jumlah dana Rp.612.550.000,- realisasi sebesar Rp.558.370.000,- (91,16%). Serapan anggaran tidak mencapai target disebabkan efisiensi pengadaan barang/jasa kebutuhan Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi. Secara fisik realisasi menunjukan 100% karena kebutuhan Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi dapat terpenuhi.
14) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi, jumlah dana Rp.23.700.000,- realisasi sebesar Rp.9.020.000,- (38,06%). Serapan anggaran tidak mencapai target disebabkan tidak banyak Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi yang rusak/diperbaiki.
15) Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Dinas/Mess, Jumlah Dana Rp.210.000.000,- realisasi sebesar Rp.197.105.200,- (93,86%). Serapan anggaran tidak mencapai target disebabkan tidak banyak Rumah Jabatan/Dinas/Mess yang rusak/diperbaiki.
16) Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan, Jumlah Dana Rp.197.995.560,- realisasi sebesar Rp.171.334.427,- (86,53%). Serapan anggaran tidak mencapai target disebabkan tidak banyak Mobil Jabatan yang rusak/diperbaiki.
17) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas/Mess, Jumlah Dana Rp.210.859.000,- realisasi

sebesar Rp.183.557.500,- (87,05%). Serapan anggaran tidak mencapai target disebabkan tidak banyak Peralatan dan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas/Mess yang rusak/diperbaiki.

18) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Jumlah Dana Rp.99.150.000,- realisasi sebesar Rp.88.792.500,- (89,55%). Serapan anggaran tidak mencapai target disebabkan tidak banyak Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang rusak/diperbaiki.
19) Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi, jumlah dana Rp.58.000.000,- realisasi sebesar Rp.13.714.000,- (23,64%). Serapan anggaran tidak mencapai target disebabkan tidak banyak komputer dan Jaringan Komputerisasiyang rusak/diperbaiki.
20) Pemeliharaan Rutin / Berkala Instalasi dan Jaringan, jumlah dana Rp.77.737.500,- realisasi sebesar Rp.26.562.500,- (34,17%). Serapan anggaran tidak mencapai target disebabkan tidak banyak instalasi dan Jaringan yang rusak/diperbaiki.
21) Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu, Jumlah dana Rp.151.250.000,- realisasi sebesar Rp.107.750.000,- (71,24%). Serapan anggaran tidak mencapai target disebabkanefisiensi pelaksanaan anggaran.
22) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan, jumlah dana Rp.93.526.000,- realisasi sebesar Rp.72.273.800,- (77,28%). Serapan anggaran tidak mencapai target disebabkan oleh tidak banyaknya undangan bimtek resmi dari instansi pemerintah yang dapat diikuti.
23) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, jumlah dana Rp. 78.536.900,- realisasi sebesar Rp. 69.069.800,- (87,95%). Serapan anggaran tidak mencapai target disebabkan efisiensi pelaksanaan anggaran. Secara fisik realisasi menunjukan 100% karena terlaksananya penyusunan buku

laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang valid, tertib dan tepat.

24) Peringatan Hari-hari Besar Nasional, jumlah dana Rp.638.859.850,- realisasi sebesar Rp.557.708.550,- (87,30%). Serapan anggaran tidak mencapai target disebabkan karena efisiensi pelaksanaan anggaran.
25) Intensifikasi Penerimaan Retribusi Pengelolaan Istana Bung Hatta, jumlah dana Rp.116.040.600,- realisasi sebesar Rp.98.614.500,- (84,98%). Serapan anggaran tidak mencapai target disebabkan situasional tidak banyaknya tingkat kebutuhan dan kunjungan tamu.
26) Peningkatan Pelayanan Keprotokolan, jumlah dana Rp.587.362.200,- realisasi sebesar Rp.514.713.490,- (87,63%). Serapan anggaran tidak mencapai target disebabkan situasional tidak banyaknya tingkat kebutuhan dan kunjungan tamu.
27) Forum Komunikasi Persandian, jumlah dana Rp.62.769.300,- realisasi sebesar Rp.54.747.800,- (87,22%). Serapan anggaran tidak mencapai target disebabkan efisiensi pelaksanaan anggaran.
28) Bimbingan Teknis Keprotokolan, jumlah dana Rp.51.160.400,- realisasi sebesar Rp.44.794.900,- (87,56%). Serapan anggaran tidak mencapai target disebabkan efisiensi pelaksanaan anggaran.

- **Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.**
  - Tidak tercapainya target kinerja kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS, disebabkan karena Jaminan Kesehatan KDH/WKDH telah menjadi tanggungan BPJS,

dimana setiap warga negara termasuk Gubernur dan Wakil Gubernur diwajibkan mengikuti Jaminan Kesehatan ini.

- **Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD.**

  Akibat dari 1 (satu) kegiatan yang tidak mencapai target tersebut secara langsung tidak mempengaruhi capaian renstra Biro Umum (pencapaian tujuan dan sasaran strategis), karena bukan bagian dari kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis Biro Umum.

- **Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.**

  Tindakan yang dilakukan mengatasi kendala tersebut adalah dengan mengurangi pagu dana kegiatan melalui mekanisme perubahan anggaran, sambil menunggu kebijakan perencanaan lebih lanjut terhadap kegiatan Penyediaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS kebutuhan KDH dan WKDh ini. Pada Tahun Anggaran 2016 kegiatan ini tidak laksanakan lagi, namun karena tanggung jawab Biro Umum dalam mendukung kebutuhan Pimpinan, maka kegiatan ini dialihkan menjadi kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan alokasi Belanja *Jasa Medical Check Up* bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Tabel 2
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sampai Tahun 2015
Provinsi Sumatera Barat

SKPD : BIRO UMUM SETDA PROVINSI SUMATERA BARAT

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RENSTRA SKPD TAHUN 2016	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2014	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015			TARGET PROGRAM/KEGIATAN RENJA SKPD TAHUN 2016	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET PROGRAM/KEGIATAN RENSTRA SKPD s/d TAHUN 2016	
								TARGET	REALISASI	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN	TINGKAT CAPAIAN (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.20				PEMERINTAHAN UMUM									
1.20	03	01		PROGRAM PELAYANAN ADM. PERKANTORAN	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	95%	95%	100%	100%	100%	100%
1.20	03	01	01	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	Persentase terpenuhinya kebutuhan jasa surat menyurat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.20	03	01	02	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	Persentase terpenuhinya kebutuhan air, listrik dan telepon	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.20	03	01	03	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	Persentase terpenuhinya kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.20	03	01	04	PENYEDIAAN JASA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN PNS	Persentase terpenuhinya jasa pemeliharaan kesehatan	100%	100%	100%	0%	0%	-	-	-
1.20	03	01	05	PENYEDIAAN JASA JAMINAN BARANG MILIK DAERAH	Jumlah objek BMD yang diasuransikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.20	03	01	08	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	Persentase terpenuhinya jasa kebersihan kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.20	03	01	10	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	Persentase terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.20	03	01	11	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	Persentase tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

1.20	03	01	12	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	Persentase terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.20	03	01	13	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	Jumlah kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	6 jenis barang	6 jenis barang	6 jenis barang	6 jenis barang	100%	10 jenis barang	10 jenis barang	166%
1.20	03	01	15	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN & PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Jumlah bahan bacaan KDH/WKDH	100%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.20	03	01	16	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	Persentase terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.20	03	01	17	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	Persentase terpenuhinya kebutuhan makan dan minum rapat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.20	03	01	18	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KEDALAM DAN LUAR DAERAH	Persentase terpenuhinya kebutuhan perjalanan dinas koordinasi dan konsultasi kedalam dan luar daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.20	03	01	22	PENYEDIAAN JASA SOPIR KANTOR	Jumlah sopir kantor yang tersedia	14 orang	14 orang	14 orang	14 orang	100%	20 orang	20 orang	143%
1.20	03	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang semakin baik	100%	90%	95%	95%	100%	100%	100%	100%
1.20	03	02	03	PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR	Jumlah sarana prasarana terbangun	1 unit	1 paket	-	-	-	-	-	-
1.20	03	02	05	PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	Jumlahkebutuhan kendaraan dinas / operasional	9 unit	10 unit	15 unit	15 unit	100%	5 unit	30 unit	333%
1.20	03	02	06	PENGADAAN PERALATAN RUMAH JABATAN/DINAS/MESS	Persentase terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas/ Mess	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.20	03	02	08	PENGADAAN PERLENGKAPAN RUMAH JABATAN/DINAS/MESS	Persentase terpenuhinya kebutuhan perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas/ Mess	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.20	03	02	10	PENGADAAN MEUBILAIR	Jumlah paket kebutuhan meubilair kantor	9 paket	11 paket	-	-	-	17 paket	28 paket	312%
1.20	03	02	15	PENGADAAN KOMPUTER DAN JARINGAN KOMPUTERISASI	Jumlah kebutuhan komputer dan jaringannya	13 unit	15 unit	13 unit	13 unit	100%	4 unit	32 unit	246%
1.20	03	02	16	PENGADAAN PERALATAN STUDIO, KOMUNIKASI, DAN INFORMASI	Jumlah kebutuhan peralatan studio	12 unit	33 unit	12 unit	12 unit	100%	20 unit	65 unit	542%
1.20	03	02	19	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN STUDIO, KOMUNIKASI DAN INFORMASI	Persentase terpenuhinya pemeliharaan peralatan studio	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

1.20	03	02	20	PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA RUMAH JABATAN/ DINAS/ MESS	Jumlah rumah jabatan yang terpelihara	3 unit rumah dinas	3 unit rumah dinas	3 unit rumah dinas	3 unit rumah dinas	100%	3 unit rumah dinas	3 unit rumah dinas	100%
1.20	03	02	21	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	Jumlah paket pekerjaan pemeliharaan gedung kantor	6 Paket	13 Paket	12 Paket	12 Paket	100%	7 Paket	18 paket	300%
1.20	03	02	22	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN	Jumlah mobil jabatan yang terpelihara	9 unit	9 unit	10 unit	10 unit	100%	10 unit	10 unit	111%
1.20	03	02	23	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	50 unit	47 unit	50 unit	50 unit	100%	47 unit	47 unit	94%
1.20	03	02	24	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH JABATAN/DINAS	Persentase terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan rumah jabatan/dinas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.20	03	02	25	PEMELIHARAAN RUTIN DAN BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	Persentase Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terpelihara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.20	03	02	27	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA INSTALASI DAN JARINGAN	Persentase terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala instalasi dan jaringan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.20	03	02	28	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KOMPUTER DAN JARINGAN KOMPUTERISASI	Persentase terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala komputer dan jaringan komputerisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.20	03	02	29	PENGELOLAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN ASET SKPD	Persentase terpenuhinya kebutuhan pengelolaan aset SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.20	03	02	32	REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR	Jumlah Gedung Kantor yang direnovasi	38 paket	14 paket	10paket	10 paket	100%	38paket	38paket	100%
1.20	03	03		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningkatnya kinerja dan disiplin aparatur	100%	90%	95%	95%	100%	100%	100%	100%
1.20	03	03	01	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA	Jumlah kebutuhan pakaian dinas beserta perlengkapannya	605 stel	646 stel	605 stel	605 stel	100%	605 stel	605 stel	100%
1.20	03	03	02	PENGADAAN PAKAIAN KERJA LAPANGAN	Jumlah kebutuhan pakaian kerjalapangan	40stel	80 stel	80 stel	80 stel	100%	60 stel	60 stel	150%
1.20	03	03	03	PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU	Jumlah kebutuhan pakaian khusus hari-hari tertentu	142 stel	53 stel	174 stel	174 stel	100%	142 stel	142 stel	100%
1.20	03	05		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	80%	90%	90%	100%	100%	100%	100%
1.20	03	05	03	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Persentase terpenuhinya kebutuhan mengikuti bimtek	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.20	03	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTIM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN	Tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pelaporan	100%	90%	95%	95%	100%	100%	100%	100%

1.20	03	06	01	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	Dokumen/laporan yang disiapkan	10 jenis	10 jenis	10 jenis	10 jenis	100%	10 jenis	10 jenis	100%
1.20	03	06	05	PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD	Persentase terpeuhinya sarana penunjang kegiatan penatausahaan keuangan SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.20	03	06	06	PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Dokumen/laporan yang disiapkan	4 jenis	4 jenis	4 jenis	4 jenis	100%	4 jenis	4 jenis	100%
1.20	03	07		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan kedinasan	100%	90%	95%	95%	100%	100%	100%	100%
1.20	03	07	01	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN TAMU PEMDA	Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan tamu yang berkunjung ke Sumbar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.20	03	07	02	PERINGATAN HARI-HARI BESAR NASIONAL	Jumlah kegiatan/iven peringatan Hari Besar Nasional	7 kegiatan	7 kegiatan	7 kegiatan	7 kegiatan	100%	7 kegiatan	7 kegiatan	100%
1.20	03	17		PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah	100%	90%	95%	95%	100%	100%	100%	100%
1.20	03	17	48	INTENSIFIKASI PENERIMAAN RETRIBUSI PENGELOLAAN ISTANA BUNG HATA	Rata-rata penyewaan kamar perbulan	18 kali	12 kali	15 kali	15 kali	100%	18 kali	18 kali	100%
1.20	03	22		PROGRAM PENGEMBANGAN MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kualitas Manajemen Pelayanan Publik	100%	90%	95%	95%	100%	100%	100%	100%
1.20	03	22	05	PENINGKATAN PELAYANAN KEPROTOKOLAN	Jumlah kunjungan yang terlayani sesuai aturan keprotokolan	360 kali	360 kali	360 kali	360 kali	100%	360 kali	360 kali	100%
1.20	03	44		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR	Meningkatnya kualitas SDM aparatur	100%	90%	95%	95%	100%	100%	100%	100%
1.20	03	44	46	FORUM KOMUNIKASI PERSANDIAN	Jumlah peserta	60 orang	60 orang	60 orang	60 orang	100%	60 orang	60 orang	100%
1.20	03	44	47	BIMBINGAN TEKNIS APARATUR PENATAUSAHAAN PIMPINAN	Jumlah peserta bimtek	60 orang	60 orang	60 orang	60 orang	100%	60 orang	60 orang	100%
1.20	03	44	48	BIMTEK KEPROTOKOLAN	Jumlah peserta bimtek	70 orang	70 orang	38 orang	38 orang	100%	52 orang	52 orang	100%
1.20	03	44	53	BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN ETOS KERJA	Jumlah peserta bimtek	60 orang	60 orang	70 orang	70 orang	100%	-	-	-

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Biro Umum sesuai dengan tugas dan fungsinya tidak mengampu salah satu SPM untuk urusan wajib maupun indikator kinerja kunci seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Sebagai unit pendukung (*supporting unit*) pada Sekretariat Daerah sesuai program prioritas pembangunan yang telah dijabarkan dari Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur, Biro Umum melaksanakan kebijakan pelayanan administrasi umum pemerintahan, antara lain : pelayanan pimpinan, pelayanan kesekretariatan dan beberapa program urusan yang berkaitan dengan **Misi ke-2 Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Profesional**.

Untuk menentukan tolak ukur keberhasilan pelayanan SKPD perlu dirumuskan indikator kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta norma dan standar pelayanan SKPD. Biro Umum sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya telah merumuskan 7 (tujuh) indikator kinerja utama (IKU) untuk menilai keberhasilan kinerja SKPD pada Tahun 2016 sampai dengan 2020.

Indikator Kinerja Utama Biro Umum dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3
Indikator Kinerja Utama Biro Umum Tahun 2016 – 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET				
				2016	2017	2018	2019	2020
1	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana	1.1	Persentase sarana dan prasarana yang berkualitas baik	83%	86 %	89 %	92 %	95 %
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan kerumahtanggaan dan persandian	2.1	Berkurangnya jumlah keluhan terhadap pelayanan kebersihan, alat pendingin dan penerangan bangunan	24 keluhan	22 keluhan	20 keluhan	18 keluhan	16 keluhan
		2.2	Jumlah konten informasi yang diamankan dengan persandian	120 buah	130 buah	140 buah	150 buah	160 buah
3	Meningkatnya kualitas pelayanan yang berorientasi pelayanan prima	3.1	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan	3,85 (Skala 5)	3,95 (Skala 5)	4,05 (Skala 5)	4,15 (Skala 5)	4,25 (Skala 5)
4	Meningkatnya kualitas pengelolaan ketatausahaan	4.1	Jumlah surat yang dilayani dengan e-Arsip	200 buah	220 buah	240 buah	260 buah	280 buah
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Setda	5.1	Waktu rata-rata penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)	2 hari	2 hari	2 hari	2 hari	2 hari
6	Meningkatnya penerimaan retribusi daerah	6.1	Persentase bertambahnya penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah dan tempat penginapan	3%	3%	3%	3%	3%

Tabel 4
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Biro Umum
Provinsi Sumatera Barat

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	SPM/ Standar Nasional	I K K (PP-6/'08)	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1	Persentase sarana dan prasarana yang berkualitas baik	-	-	80%	83%	86%	89%	72,14%	-	81,5	86	
2	Berkurangnya jumlah keluhan terhadap pelayanan kebersihan, alat pendingin dan penerangan bangunan	-	-	-	24 keluhan	22 keluhan	20 keluhan	-	-	-	-	
3	Jumlah konten informasi yang diamankan dengan persandian	-	-	110 buah	120 buah	130 buah	140 buah	100 buah	-	125 buah	135 buah	
4	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan	-	-	3,75	3,85	3,95	4,05	3,83	-	3,95	4,05	
5	Jumlah surat yang dilayani dengan e-Arsip	-	-	-	200 bh	220 bh	240 bh	-	-	-	-	
6	Waktu rata-rata penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)	-	-	2 hari	2 hari	2 hari	2 hari	2 hari	-	2 hari	2 hari	
7	Persentase bertambahnya penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah dan tempat penginapan	-	-	-	3%	3%	3%	-	-	-	-	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Peran perencanaan strategis sangatlah penting dalam membantu organisasi untuk menetapkan isu strategis yang perlu dan relevan untuk diperjuangkan. Kegagalan organisasi dalam menetapkan isu strategis akan berdampak pada penyelenggaraan tugas dan fungsi secara rutin (*bussiness as usual)* dan reaktif. (John M. Bryson, 2000:xviii).

Mencermati hal ini, serta sebagai upaya untuk membenahi pelaksanaan tugas agar terhindar dari *rutinitas* dan *reaktif*, Biro Umum mencoba merumuskan beberapa isu strategis terkait dengan tugas pokok dan fungsi antara lain:

1. Optimalisasi fungsi pelayanan publik menjadi fokus perhatian pemerintah daerah saat ini karena besarnya tuntutan masyarakat. Biro Umum sebagai lini pendukung (*supporting staff*) Setda menjadi yang terdepan dalam penguatan fungsi pelayanan publik ini karena vitalnya tupoksi yang dimiliki dalam memfasilitasi pimpinan, tamu pemda dan masyarakat. Secara menyeluruh, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat selalu berupaya untuk melakukan penguatan dan optimalisasi “peran” masing-masing SKPD. Hal ini sejalan dengan semakin besarnya tuntutan masyarakat untuk memperoleh layanan yang baik dan memuaskan dari birokrasi.
2. Sejalan dengan arah pembangunan daerah pada periode RPJMD ke III yang diarahkan pada peningkatan daya saing daerah, maka Biro Umum sebagai yang terdepan dalam melayani pimpinan dan tamu-tamu pemda, perlu menyikapinya dengan penguatan kapasitas organisasi, agar dapat memberikan dukungan berupa sarana dan prasarana yang memadai serta SDM yang handal.
3. Dibukanya keran globalisasi yang ditandai dengan Masyarakat Ekonomi Asean 2015 menyebabkan derasnya arus keluar masuk barang dan jasa termasuk orang secara domestik maupun

internasional. Oleh sebab itu, perlu ditingkatkan daya saing daerah yang salah satu faktor pentingnya adalah membangun citra dan reputasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ditingkat nasional maupun internasional. Mewujudkan pelayanan publik yang prima perlu menjadi fokus perhatian karena kualitas pelayanan yang semakin baik akan berbanding lurus dengan tingginya tingkat kepercayaan publik. Selanjutnya citra dan reputasi Pemerintah Provinsi Sumbar akan terangkat secara eksponensial (berkali lipat) karena dengan memberikan pelayanan yang baik akan menanamkan kesan yang baik dihati tamu-tamu daerah/ pengguna layanan, dan secara tidak langsung kesan yang baik tersebut akan menyebar luas.

Tantangan dan peluang merupakan faktor eksternal yang akan mempengaruhi organisasi dalam mewujudkan tujuan yang hendak dicapainya. Biro umum sebagai unit pendukung pelayanan pimpinan dan kesekretariatan kedepannya akan menghadapi tantangan yang cukup berat dalam memberikan dukungan terhadap kesuksesan tugas-tugas kepala daerah dan wakil kepala daerah. Selain itu, tantangan juga akan datang dari aspek pelayanan publik yang semakin menuntut standar pelayanan prima. Sehingga faktor kualitas SDM dan Sarana dan Prasarana menjadi dua aspek yang harus diperhatikan.

Peluang yang ada kedepannya cukup memberikan kesempatan bagi organisasi untuk terus berkembang. Pemanfaatan teknologi maju dalam pelayanan publik adalah salah satu peluang yang mesti direspon oleh Biro Umum, karena perubahan zaman yang begitu masif ini menuntut organisasi untuk bergerak cepat, mudah dan transparan. Selain itu, peluang juga terlihat pada aspek pengembangan manajemen SDM. Arah pembangunan Sumatera Barat pada periode RPJMD berikutnya menuntut peningkatan daya saing daerah, maka organisasi telah mesti mempersiapkan diri dengan meningkatkan kapasitas SDM yang dimilikinya sejak mulai dari sekarang.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan rekomendasi dan catatan strategis dalam perumusan program dan kegiatan tahun 2017 yaitu:

1. Meningkatkan daya dukung sarana dan prasarana melalui pengadaan barang dan jasa yang dapat mendukung pelayanan Biro Umum, utamanya fasilitas pada beberapa gedung/asset yang dikelola sertasarana dan prasarana untuk kebutuhan Pimpinan.
2. Meningkatkan daya dukung personil melalui rekruitmen tenaga khusus yang dibutuhkan guna memenuhi kebutuhan pelayanan Biro Umum.
3. Meningkatkan dukungan teknologi pada pelayanan Biro Umum seperti e-arsip dan e-agenda.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan Biro Umum pada 7 (tujuh) layanan unggulan Biro Umum, yaitu Pelayanan VIP Room Bandara Internasional Minangkabau, Pelayanan Keprotokolan, Pelayanan Ruang Pertemuan, Pelayanan Penginapan di Istana Bung Hatta, Pelayanan Peminjaman Kendaraan dan Fasilitas Kedinasan, Pelayanan Penerimaan dan Pendistribusian Surat, dan Pelayanan Penerbitan Surat Perintah Membayar.

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tabel 5
Kajian Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat
Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2017

SKPD: Biro Umum Setda

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6

N I H I L

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telahaan terhadap Kebijakan Nasional

Setelah dilakukan telaah terhadap kebijakan nasional yang berkaitan dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah dan tugas pokok dan fungsi SKPD, Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat tidak memiliki program yang berkaitan dengan kebijakan nasional, karena fungsi Biro Umum yang merupakan lini pendukung/supporting unit pada Sekretariat Daerah dan bukan SKPD teknis.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Tabel 5
Tujuan dan Sasaran Strategis Renja 2017 Biro Umum

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Mewujudkan pengelolaan sarana dan prasarana yang berkualitas	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana	Persentase sarana dan prasarana yang berkualitas baik	86 %

2	Mewujudkan pengelolaan kerumahtanggaan dan Persandian yang handal	Meningkatnya kualitas pengelolaan kerumahtanggaan dan Persandian	Berkurangnya jumlah keluhan terhadap pelayanan kebersihan, alat pendingin dan penerangan bangunan	22 keluhan
			Jumlah konten informasi yang diamankan dengan persandian	130 konten
3	Mewujudkan pelayanan pimpinan dan pelayanan administrasi yang prima	Meningkatnya kualitas pelayanan yang berorientasi pelayanan prima	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan	3,95 (skala 5)
		Meningkatnya kualitas pengelolaan ketatausahaan	Jumlah surat yang dilayani dengan e-Arsip	220 surat
		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Setda	Waktu rata-rata penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)	2 hari
4	Meningkatkan pendapatan asli daerah	Meningkatnya penerimaan retribusi daerah	Persentase bertambahnya penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah dan tempat penginapan	3%

4.1. Strategi dan Kebijakan SKPD

Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan teknik yang lebih sempit dan merupakan rangkaian kebijakan, sehingga strategi merupakan cara mencapai

tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah dijabarkan sebelumnya, strategi yang diterapkan Biro Umum antara lain:

1. Revitalisasi Sarana dan Prasarana guna meningkatkan daya dukung.
2. Revisi Standar Pelayanan yang ramah, cepat dan akuntabel.
3. Meningkatkan kapasitas dan kinerja Sumber Daya Aparatur.
4. Meningkatkan kemampuan teknis dan non teknis aparatur.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh suatu organisasi untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/indikasi kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan strategi, sasaran, tujuan, serta misi dan visi.

Arah kebijakan Biro Umum Tahun 2016 – 2020 adalah:

1. Meningkatkan daya dukung Sarana dan Prasarana yang memenuhi standar;
2. Meningkatkan dukungan teknologi pada sarana dan prasarana pendukung kegiatan;
3. Merevisi standar pelayanan dan prosedur operasi yang ramah, cepat dan akuntabel;
4. Menerapkan “reward and punishment” terhadap aparatur secara proporsional;
5. Menerapkan budaya kerja yang profesional, ramah dan inovatif;
6. Memberikan pelatihan dan bimbingan teknis yang dibutuhkan kepada SDM Aparatur.

4.2. Program dan Kegiatan

Mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi Biro Umum dan program prioritas pembangunan RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2010-2015 serta penjabaran visi, misi, tujuan dan sasaran SKPD yang telah dirumuskan, maka Biro Umum melaksanakan 8 (delapan) program dan 46 (empat puluh enam) kegiatan.

Untuk dapat mengimplementasikan visi, misi, yang dioperasionalkan melalui strategi dan kebijakan, maka dalam lima tahun ke depan dirumuskanlah program dan kegiatan dalam mewujudkan sasaran yang telah ditargetkan. Rencana Pagu Dana yang dibutuhkan menjalankan 8 program dan 46 kegiatan pada Tahun 2017 sebesar Rp. 32.421.207.359,-. Jumlah tersebut lebih kecil atau turun menjadi 73,79% dari total pagu anggaran Tahun 2016 yang sebesar Rp. 43.938.601.200,-.

Program dan kegiatan beserta rencana target kinerja dan anggaran yang akan dilaksanakan pada tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017
Dan Perkiraan Maju Tahun 2018
Provinsi Sumatera Barat

SKPD : BIRO UMUM SETDA PROVINSI SUMATERA BARAT

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
						LOKASI	TAGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TAGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)
1.20				PEMERINTAHAN UMUM								
1.20	03	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran							
1.20	03	01	01	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	Jumlah tenaga honor non PNS yang dibayarkan jasanya	Sumbar	11 orang	Rp 314.370.450	APBD		11 orang	Rp 345.807.495
1.20	03	01	02	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	Terlaksananya pembayaran rekening air, listrik dan telepon kantor	Sekretariat Daerah	12 bulan	Rp 3.559.667.604	APBD		12 bulan	Rp 3.915.634.364
1.20	03	01	03	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	Terlaksananya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Sekretariat Daerah	12 Bulan	Rp 413.562.500	APBD		12 Bulan	Rp 454.918.750

1.20	03	01	05	PENYEDIAAN JASA JAMINAN BARANG MILIK DAERAH	Terlaksananya pembayaran PBB dan premi asuransi barang milik daerah	Sekretariat Daerah	63 unit	Rp 396.100.000	APBD		62 unit	Rp 435.710.000
1.20	03	01	08	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	Terlaksananya jasa kebersihan kantor	Sekretariat Daerah	12 Bulan	Rp 1.818.650.000	APBD		12 Bulan	Rp 2.000.515.000
1.20	03	01	10	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor	Biro Umum	1 Tahun	Rp 300.000.000	APBD		1 Tahun	Rp 330.000.000
1.20	03	01	11	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Biro Umum	1 Tahun	Rp 179.500.000	APBD		1 Tahun	Rp 197.450.000
1.20	03	01	12	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Sekretariat Daerah	1 Tahun	Rp 101.710.000	APBD		1 Tahun	Rp 111.881.000
1.20	03	01	13	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	Tersedianya kebutuhan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Sekretariat Daerah	64 item	Rp 1.479.650.000	APBD		62 item	Rp 1.627.615.000
1.20	03	01	15	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN & PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	KDh, WKDh dan Sekda	1 Tahun	Rp 50.000.000	APBD		1 Tahun	Rp 55.000.000
1.20	03	01	16	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	Terlaksananya penyediaan bahan logistik kantor	Sekretariat Daerah	12 Bulan	Rp 99.976.000	APBD		12 Bulan	Rp 109.973.600
1.20	03	01	17	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	Terlaksananya makan dan minum untuk rapat	Sekretariat Daerah	12 Bulan	Rp 147.750.000	APBD		12 Bulan	Rp 162.525.000
1.20	03	01	18	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KEDALAM DAN LUAR DAERAH	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Sekretariat Daerah	1 Tahun	Rp 5.102.535.702	APBD		1 Tahun	Rp 5.612.789.272
1.20	03	01	22	PENYEDIAAN JASA SOPIR KANTOR	Tersedianya penyediaan jasa sopir kantor	Sekretariat Daerah	25 Orang	Rp 503.054.500	APBD		25 Orang	Rp 553.359.950

1.20	03	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur							
1.20	03	02	05	PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	Terpenuhinya kendaraan dinas/Operasional roda dua	Sekretariat Daerah	7 Unit	Rp 1.709.600.000	APBD		8 unit	Rp 1.880.560.000
1.20	03	02	06	PENGADAAN PERALATAN RUMAH JABATAN/DINAS/MESS	Terlaksananya pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas/mess	Sekretariat Daerah	12 Bulan	Rp 851.373.188	APBD		12 Bulan	Rp 936.510.507
1.20	03	02	08	PENGADAAN PERLENGKAPAN RUMAH JABATAN/ DINAS / MESS	Terlaksananya pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas/mess	Sekretariat Daerah	109 Item	Rp 638.406.250	APBD		109 item	Rp 702.246.875
1.20	03	02	10	PENGADAAN MEUBILAIR	Terlaksananya pengadaan meubeleur kantor	Sekretariat Daerah	14 Item	Rp 2.576.000.000	APBD		15 item	Rp 2.833.600.000
1.20	03	02	15	PENGADAAN KOMPUTER & JARINGAN KOMPUTERISASI	Terlaksananya pengadaan komputer dan jaringan komputerisasi	Sekretariat Daerah	10 Item	Rp 109.000.000	APBD		11 Item	Rp 119.900.000
1.20	03	02	16	PENGADAAN PERALATAN STUDIO, KOMUNIKASI DAN INFORMASI	Terlaksananya pengadaan peralatan studio, komunikasi dan informasi	Sekretariat Daerah	10 Item	Rp 542.600.000	APBD		11 Item	Rp 596.860.000
1.20	03	02	19	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN STUDIO, KOMUNIKASI DAN INFORMASI	Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala peralatan studio, komunikasi dan informasi	Sekretariat Daerah	12 Bulan	Rp 44.300.000	APBD		12 Bulan	Rp 48.730.000
1.20	03	02	20	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH JABATAN/DINAS/MESS	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/rumah dinas/ mess	KDh, WKDh dan Sekda	12 Bulan	Rp 216.000.000	APBD		12 Bulan	Rp 237.600.000
1.20	03	02	21	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Sekretariat Daerah	1 Tahun	Rp 578.370.000	APBD		1 Tahun	Rp 636.207.000
1.20	03	02	22	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN	Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan	KDh, WKDh dan Sekda	1 Tahun	Rp 234.492.400	APBD		1 Tahun	Rp 257.941.640

1.20	03	02	23	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Sekretariat Daerah	1 tahun	Rp 830.222.350	APBD		1 tahun	Rp 913.244.585
1.20	03	02	24	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH JABATAN/DINAS/MESS	Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala peralatan dan perlengkapan rumah jabatan/ dinas/ mess	KDh, WKDh dan Sekda	12 Bulan	Rp 190.859.000	APBD		12 Bulan	Rp 209.944.900
1.20	03	02	25	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Sekretariat Daerah	12 Bulan	Rp 160.735.000	APBD		12 Bulan	Rp 176.808.500
1.20	03	02	27	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KOMPUTER DAN JARINGAN KOMPUTERISASI	Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala komputer dan jaringan komputerisasi	Sekretariat Daerah	12 Bulan	Rp 58.000.000	APBD		12 Bulan	Rp 63.800.000
1.20	03	02	28	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA INSTALASI DAN JARINGAN	Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala instalasi dan jaringan	Sekretariat Daerah	12 Bulan	Rp 300.693.050	APBD		12 Bulan	Rp 330.762.355
1.20	03	02	29	PENGELOLAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN ASET SKPD	Terlaksananya pengelolaan, pengawasan dan pengendalian asset SKPD	Sekretariat Daerah	1 Tahun	Rp 98.343.850	APBD		1 Tahun	Rp 108.178.235
1.20	03	02	32	REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR	Terlaksananya rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	Sumbar	23 paket	Rp 3.224.900.000	APBD		23 paket	Rp 3.547.390.000
1.20	03	03		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningkatnya kinerja dan disiplin aparatur							
1.20	03	03	01	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA	Terlaksananya pengadaan dinas beserta kelengkapan	Sekretariat Daerah	616 stel	Rp 417.768.500	APBD		616 stel	Rp 459.545.350
1.20	03	03	02	PENGADAAN PAKAIAN KERJA LAPANGAN	Terlaksananya pengadaan pakaian kerja lapangan	Sekretariat Daerah	120 Stel	Rp 64.800.000	APBD		120 Stel	Rp 71.280.000

1.20	03	03	03	PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU	Terlaksananya pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Sekretariat Daerah	142 stel	Rp 156.300.000	APBD		142 stel	Rp 171.930.000
1.20	03	05		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Aparatur							
1.20	03	05	02	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Sekretariat Daerah	1 Tahun	Rp 124.938.000	APBD		1 Tahun	Rp 137.431.800
1.20	03	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTIM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN	Tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pelaporan							
1.20	03	06	01	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi	Sekretariat Daerah	12 Bulan	Rp 95.093.534	APBD		12 Bulan	Rp 104.602.887
1.20	03	06	03	PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Terlaksananya penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD	Biro Umum	8 dokumen	Rp 75.557.597	APBD		8 dokumen	Rp 83.113.357
1.20	03	06	05	PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD	Terlaksananya penatausahaan keuangan SKPD	Sekretariat Daerah	12 Bulan	Rp 233.906.534	APBD		12 Bulan	Rp 257.297.187
1.20	03	07		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan kedinasan							
1.20	03	07	01	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN TAMU PEMDA	Terlaksananya penyediaan jasa pelayanan tamu pemerintah daerah	Sumbar	12 Bulan	Rp 6.126.740.000	APBD		12 Bulan	Rp 6.739.414.000
1.20	03	07	02	PERINGATAN HARI-HARI BESAR NASIONAL	Terlaksananya peringatan hari-hari besar Nasionanl	Sekretariat Daerah	7 Hari Besar Nasional	Rp 697.312.900	APBD		7 Hari Besar Nasional	Rp 767.044.190
1.20	03	17		PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah							

1.20	03	17	48	INTENSIFIKASI PENERIMAAN RETRIBUSI PENGELOLAAN ISTANA BUNG HATA	Terlaksananya intensifikasi penerimaan retribusi pengelolaan istana bung hatta	Sumbar	12 Bulan	Rp 270.026.650	APBD		12 Bulan	Rp 297.029.315
1.20	3	17	49	INTENSIFIKASI PENERIMAAN RETRIBUSI PENGELOLAAN GEDUNG ROHANA KUDUS	Terlaksananya intensifikasi penerimaan retribusi pengelolaan gedung rohana kudus	Sekretariat Daerah	12 Bulan	Rp 115.948.600	APBD		12 Bulan	Rp 127.543.460
1.20	03	22		PROGRAM PENGEMBANGAN MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Keprotokolan							
1.20	03	22	01	PENINGKATAN PELAYANAN KEPROTOKOLAN	Terlaksananya peningkatan pelayanan keprotokolan	Sumbar	12 Bulan	Rp 648.630.350	APBD		12 Bulan	Rp 713.493.385
1.20	03	22	39	RAKOR KOMUNIKASI PERSANDIAN	Terlaksananya rakor komunikasi persandian	Sumbar	60 Orang	Rp 68.514.550	APBD		60 Orang	Rp 75.366.005
1.20	03	22	40	RAKOR PENATAUSAHAAN PIMPINAN	Terlaksananya rakor penatausahaan pimpinan	Sumbar	60 orang	Rp 75.215.400	APBD		60 orang	Rp 82.736.940
1.20	03	22	41	RAKOR KEPROTOKOLAN	Terlaksananya rakor keprotokolan	Sumbar	52 Orang	Rp 85.907.900	APBD		52 Orang	Rp 94.498.690
				Jumlah				**Rp 36.087.082.359**				**Rp. 39.695.790.595**

BAB VI

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 merupakan pedoman bagi seluruh Bagian di Biro Umum dalam merencanakan dan melaksanakan program kegiatan agar memiliki satu persepsi yang sama tentang Renja yang telah ditetapkan. Dengan demikian pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan dapat tercapai dengan hasil yang optimal.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu faktor pendukung keberhasilan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat. Untuk mencapai keberhasilan tersebut perlu didukung oleh anggaran, SDM yang profesional dan sarana prasarana yang memadai.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Biro Umum tahun 2017 ini disusun untuk memberi gambaran tentang rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2017.

Padang, Maret 2016

KEPALA BIRO UMUM,

ASBEN HENDRI, SE, MM
Pembina Tk.I, NIP. 19631209 198611 1 003